

Implementation of the Application of Information Technology in Improving the Efficiency and Effectiveness of Financial Management in the Sidoarjo Regional Financial and Asset Management Agency [Implementasi Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo]

Dinda Dwi Nurlaila¹⁾, Wiwit Hariyanto ^{*2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: wiwitbagaskara@umsida.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to provide an overview of the Implementation of Information Technology in enhancing the Efficiency and Effectiveness of Financial Management. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Sidoarjo using 3 Informants initialized as TW, NS, IA. The researcher employed a qualitative method with a descriptive approach. Primary data sources were utilized in this research through data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings of this research indicate that the implementation of SIKSDA Information Technology at BPKAD Sidoarjo has significantly improved financial management by simplifying and expediting processes while reducing the risk of fraud. The efficiency of financial management is evidenced by the connection of SIKSDA to Bank Jatim, the paperless application, and the integration utilizing Electronic Signatures. Its effectiveness is demonstrated by the reduction of errors due to the shift from manual recording to a web application that automatically corrects mistakes.*

Keywords - *Implementation of Information Technology; Efficiency and Effectiveness of Financial Management; Regional Financial and Asset Management Agency.*

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo dengan menggunakan Informan yang berinisial TW, NS, IA. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer digunakan dalam penelitian ini melalui Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Teknologi Informasi SIKSDA di BPKAD Sidoarjo telah meningkatkan pengelolaan keuangan secara signifikan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses sekaligus mengurangi risiko penipuan. Efisiensi pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terkoneksi SIKSDA ke Bank Jatim, penerapan paperless, dan integrasi memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik. Efektivitasnya ditunjukkan dengan berkurangnya kesalahan karena peralihan dari pencatatan manual ke aplikasi web yang secara otomatis memperbaiki kesalahan.*

Kata Kunci – *Penerapan Teknologi Informasi; Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.*

I. PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin berkembang ini, sistem informasi di Indonesia berkembang cukup pesat. Pada Era Kontemporer tidak bisa dihentikan dikarenakan negara yang sudah maju memasuki era 5.0 yang berbasis teknologi, secara otomatis tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia dalam menyelesaikan tugasnya. Manusia berhasil mempercepat kemajuan teknologi yang menjadikannya semakin canggih dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah Society 5.0 yang dimulai oleh pemerintah Jepang untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih nyaman dan produktif. Hal ini memungkinkan kita memanfaatkan teknologi modern seperti *Internet Of Things (IOT)* Kecerdasan Buatan (AI) atau Machine Intelijen, dan Robotika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Society 5.0 diciptakan sebagai respons terhadap Industri 4.0 dan diluncurkan secara resmi pada tanggal 21 Januari 2019 [1].

Secara sederhana konsep Society 5.0 dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan data dari dunia nyata kemudian mengolahnya dengan komputer dan menerapkan hasil pengolahannya ke dunia nyata. Adapula istilah “Revolusi Industri 5.0 yang mewakili visi industri, hal ini bertujuan untuk melampaui efisiensi dan produktivitas sebagai satu-satunya tujuan dan memperkuat peran dan kontribusi industri kepada masyarakat. Dalam konteks revolusi industri, penggunaannya adalah kecerdasan buatan (AI) sebagai komponen utamanya, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi terkini namun mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya [2].

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi periode yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Pelaporan keuangan memungkinkan para pemimpin organisasi untuk lebih memahami kesehatan keuangan organisasinya dengan data nyata tentang kesehatan organisasinya [3]. Tentu saja suatu instansi pemerintah yang baik memerlukan sistem informasi keuangan yang efisien dan teratur. Tanpa laporan keuangan, sulit bagi lembaga pemerintah untuk menganalisis apa yang terjadi di dalam organisasi. Adapun yang mengatakan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan pada suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan ikhtisar proses pencatatan, yaitu ikhtisar transaksi keuangan yang terjadi selama tahun anggaran [4]. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan suatu perusahaan, kinerja dan perubahan status keuangan, dan banyak pengguna yang menggunakannya untuk mengambil keputusan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat dibagikan kepada pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan [5].

Pengelolaan keuangan yang baik diwujudkan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Keuangan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 [6]. Sejak berlakunya Undang-Undang Keuangan No. 17 Pada Tahun 2003, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan negaranya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan [7].

Banyak faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, untuk membuat dan menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas, kita membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi publik. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena orang yang menyusunnya sudah familiar dengan SAP [8]. Faktor berikutnya yang mempengaruhi pelaporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2005. SAP disajikan dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (RSAP) yang menggambarkan standar akuntansi pemerintahan secara umum dan didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kerangka konseptual, dari akuntansi publik. Karena menurut SAP, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih baik jika disusun dengan benar. Kualitas laporan yang dihasilkan akan ditingkatkan dalam hal relevansi dan keandalan. Terdapat pengaruh antara SAP terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, terutama yang dimasukkan ke dalam kerangka kerja pemerintah baik di tingkat nasional, pusat, departemen, dan organisasi serta pemerintah daerah. Laporan keuangan disiapkan oleh pemerintah daerah merupakan dasar pengambilan keputusan oleh beberapa pemangku kepentingan [6].

Pada tanggal 30 Desember 2020, Kementerian Daerah telah menerbitkan dan melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Pada tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, Dewan Perekonomian daerah didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala daerah menentukan prioritas dan batasan anggaran pada saat menyusun APBD dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja daerah [9]. Tugas utama pemerintah daerah adalah mewujudkan otonomi daerah guna mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di daerah masing-masing. Sedangkan tugas dan wewenang pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU, khususnya pengelola pemerintah daerah, pengelola pembangunan daerah, pengelola pelayanan umum, pengelola keuangan daerah, dan pengelola pembangunan daerah [10]. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD, dan menyampaikan rancangan peraturan daerah terkait APBD kepada DPRD. Rancangan peraturan APBD daerah dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban daerah bersama DPRD dan dapat mewakili daerah diluar atau dalam lingkup pokok pemerintahan daerah [11].

Menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman standar akuntansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan cara inilah tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai. Sistem dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ada dua, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber laporan keuangan SKPD, sehingga menjadi tanggung jawab setiap orang untuk menyusun laporan keuangan SKPD dengan sebaik-baiknya. Laporan keuangan pemerintah harus mematuhi Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dievaluasi setiap tahun dalam bentuk laporan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Auditor mengeluarkan empat jenis opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini wajar tanpa pengecualian (TP), dan opini tidak memberikan pendapat atau tidak memberikan opini (TMP). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 16 ayat 1, opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kebenaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. memungkinkan pengelolaan keuangan daerah mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan yang terkendali, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan inklusif. Oleh karena itu, pada tahun 2013, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 64 tentang penyelenggaraan Akuntansi yang benar. Standar akuntansi daerah menggantikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan merupakan upaya nyata untuk mencapai transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, yang dikembangkan berdasarkan prinsip

ketetapan waktu, akuntansi yang bertanggung jawab dan tata kelola yang berlaku umum, sehingga perbandingan dapat dilakukan tanpa menyestakan [12].

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan dari teknologi untuk peningkatan kemampuan dari pengelolaan pemerintah. Misalnya, dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah, pemanfaatan teknologi pada saat ini memang sangat dibutuhkan dalam proses pengelolaan pemerintah. Ketika teknologi tersedia bagi pemerintah, masyarakat menjadi lebih mudah memperoleh informasi. Selain itu juga, hal ini sangat memudahkan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas demi tata kelola pemerintah [1].

Teknologi Informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sehari-hari, menyederhanakan operasi, mengelola manajemen organisasi dan aktivitas strategis, dan menyediakan dokumen yang diperlukan. Informasi berasal dari beberapa fakta atau data yang perlu diverifikasi lebih menyeluruh sehingga memerlukan penggunaan sistem pengolahan informasi yang disebut SIKSDA (Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo) [13]. Teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga teknologi informasi dan

komunikasi untuk mengirimkan informasi. Komputer adalah landasan teknologi informasi, alat yang sangat meningkatkan kemampuan manusia dan memungkinkan kita melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Peralatan komputer memungkinkan data informasi diproses, sehingga sangat meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan [14].

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten/ kota yang dinilai kementerian komunikasi dan informatika dalam proyek moving top 100 Smart Cities. Menurut Eli sudeo, Kepala Bidang Prasarana dan Keamanan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, OPD dan pemangku kepentingan dunia usaha dalam penyerahan Top Digital Award 2020 sebagai puncak dari proyek "*Sidoarjo Smart Investment City*" diharapkan mampu didorong oleh OPD dan pelaku usaha yang menggunakan Teknologi Informasi. Pada Selasa 17 Desember 2020, jaringan Ojuga dapat digunakan untuk pemantauan ATCS terhadap informasi operasional penting seperti keselamatan dan keamanan pelayanan publik, informasi investasi, dan non-penugasan, dan pemasangan hingga 48 CCTV. Kamera tersebut akan digunakan di tempat umum dan dijalan untuk menyediakan sistem keamanan pusat data ISO 27001 yang mengoptimalkan layanan kota untuk pembangunan fasilitas WI-FI gratis. Pusat kota memiliki ruang terbuka, dan ruang hijau lainnya dengan WI-Fi gratis, dan rumah sakit umum setempat telah memiliki konektivitas WIFI gratis, kebijakan penerapan smart city dilaksanakan oleh Kabupaten Sidoarjo. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) minimal memerlukan satu inovasi. Dengan demikian, pelayanan administrasi berubah akibat penerapan teknologi informasi [15].

Pemerintah kota Sidoarjo khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA). Sistem informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) adalah aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah kota sebagai alat untuk memfasilitasi penerapan berbagai peraturan keuangan daerah dan meningkatkan kinerja. Pemerintah kini memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat untuk mengelola perekonomian daerah secara transparan dan akuntabel. Financial Technology adalah sistem informasi keuangan Sidoarjo. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong penerapan sistem informasi dan data pembangunan, perekonomian, dan administrasi publik lainnya untuk pengambilan keputusan di seluruh tingkat daerah dan pusat. Sistem tersebut juga menciptakan database daerah yang mendukung pengembangan sistem informasi daerah yang akurat dan efisien serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan daerah melalui kolaborasi berbasis teknologi dengan memperhatikan potensi dan sumber daya daerah [11].

Secara umum, Sistem Informasi Pemerintah merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penyusunan anggaran pelaksanaan anggaran, dan pelaporan kepada pemerintah. Sistem Informasi Pemerintah ini menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik dengan memastikan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi. Untuk mencapai tujuan organisasi dan melayani masyarakat pada seluruh tingkat pemerintah daerah [16]. Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi siksda ini dibangun sejak tahun 2014 seiring dengan diberlakukannya peraturan pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, penerapan aplikasi SIKSDA ini diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai Pengelolaan Sistem Informasi Daerah yang tepat dan menjadikannya dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan daerah. Aplikasi SIKSDA ini berbentuk website yang bertujuan untuk memudahkan menyusun anggaran kerja, anggaran perangkat daerah, dan penyusunan rancangan APBD dan APBDes Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu perlu menggunakan model implementasi untuk mendapatkan gambaran implementasi SIKSDA. Implementasi melibatkan tindakan yang diambil baik oleh individu maupun kelompok dan harus dikelola untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan implementasi adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan program untuk mencapai implementasi kebijakan [17].

Dalam kebijakan publik, implementasi merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari proses kebijakan kemudian harus diterjemahkan ke dalam kegiatan dan tindakan praktis dalam proses implementasi. Setelah tahap perumusan kebijakan selesai, implementasinya kadang-kadang disebut sebagai deklarasi kebijakan yang mencakup kebijakan-kebijakan yang

diputuskan untuk diterapkan pada berbagai tahap. Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli yang berbeda mengenai konsep ini adalah bahwa implementasi merupakan tahapan proses yang sangat penting yang berupa tindakan, yang tujuannya ditetapkan melalui kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil kinerja [11].

Pada permasalahan yang ada di BPKAD Sidoarjo sebelum SIKSDA diluncurkan, dalam upaya menyiapkan anggaran, akuntansi, laporan keuangan masih menggunakan cara yang terbilang manual dan pembayaran masih dilakukan secara tunai. Kemudian untuk melakukan penatausahaan keuangan OPD mengirimkan berkas fisik ke kantor BPKAD sehingga hal tersebut dapat memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak dalam pekerjaannya. Permasalahan lain diantaranya adalah OPD melakukan transaksi pembayaran tunai langsung ke penyedia barang dan jasa sehingga resiko tinggi akan terjadinya kecurangan dan tindak kriminal. Hal tersebut dapat menyulitkan untuk mengevaluasi laporan keuangan dan sangat tinggi terjadinya risiko kecurangan dalam laporan keuangan. SIKSDA dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi dalam penyusunan

laporan keuangan dan memudahkan dalam proses kompilasi keuangan. Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mendorong implementasi melalui mekanisme yang tepat dan regulasi. Aplikasi SIKSDA memperhatikan seluruh peraturan terkait keuangan masyarakat dan dirancang sebagai aplikasi desktop terintegrasi yang mudah digunakan serta memiliki sistem pengendalian internal yang unik dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal itu tentu akan memberikan ketenangan pikiran bagi para pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan daerah [18].

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang terjadi di BPKAD kota Semarang. Dimana permasalahan yang terjadi adalah penerapan SIPD dalam pengelolaan Keuangan Daerah sudah dilaksanakan. Namun, pada dimensi sumber utama pada indikator fasilitas Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang ini antara lain adalah pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal, server yang tersedia kurang kuat, teknis pengelolaan keuangan terkait AKLAP Laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporan tersebut belum *balance* dan pengambilan LS kas umum belum sesuai.

Kemudian yang ke dua pada penelitian sebelumnya tentang “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Medan”. Permasalahannya adalah implementasi SIPD di kota medan belum sepenuhnya terlaksana karena kualitas sistem yang masih rendah. Selain itu, cara ini juga tidak efisien dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk memberikan bimbingan teknis, dan masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum terbiasa dengan hal tersebut.

Selanjutnya yang ke tiga pada penelitian sebelumnya ini dilaksanakan pada Desa Permisian dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Pada Desa Permisian”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa di Desa Permisian ini sudah menggunakan sistem informasi akuntansi Keuangan Desa, dengan diluncurkannya aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES ini digunakan untuk mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan akuntansi. Namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi aplikasi SISKEUDES. Hal ini merupakan indikator komunikasi yang menunjukkan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Namun komunikasi dalam proses dukungan teknis dinilai masih belum lengkap. Sebab, pihak penyelenggara hanya menjelaskan sekilas dokumen tersebut dan belum memahaminya secara utuh. Pada saat itu, indikator sumber daya manusia (SDM) penyelenggara sistem keuangan desa (SISKEUDES) masih belum memberikan pedoman dalam pengoperasian SISKEUDES, jaringan infrastruktur masih lambat dan daya 50 Mbit/s tidak memadai.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang Implementasi Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo.

II. Metode

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan pencairan, perolehan, pengumpulan, dan pencatatan data, baik berupa data primer maupun sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu karya ilmiah yang menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu masalah yang terjadi [19]. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menyediakan data deskriptif tertulis dan verbal serta perilaku yang diamati terkait dengan fenomena yang terjadi [20]. Bagi yang mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat dan karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau diuraikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif [21].

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk melestarikan bentuk dan isi perilaku manusia serta menganalisis sifatnya daripada mengubahnya menjadi satuan kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menciptakan uraian, gambaran, atau representasi yang sistematis, akurat secara faktual mengenai ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti [22].

Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana gambaran Teknologi Informasi SIKSDA sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi tersebut, apakah sudah terbukti efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan yang ada di BPKAD Sidoarjo.

Key Informan

Tiga informan kunci yang digunakan dalam penelitian ini yaitu TW, NS, dan IA. Alasan penggunaan key Informan TW adalah karena beliau menjabat sebagai sekretaris BPKAD Sidoarjo, sehingga data yang dibutuhkan nantinya akan lebih akurat. Selain itu, informan kunci NS dipilih karena beliau merupakan ahli teori yang menguasai pengelolaan keuangan dan juga merupakan ASN dengan jabatan sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi pada BKAD Sidoarjo. Terakhir, alasan peneliti menggunakan key informan IA karena beliau merupakan pakar atau tenaga ahli yang menangani sistem SIKSDA.

Tabel 1. Key Informan

No	Nama	Keterangan
1.	TW	Sekretaris BPKAD Sidoarjo
2.	NS	ASN dengan jabatan sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi
3.	IA	Operator atau Tenaga Ahli SIKSDA

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan data informasi yang langsung diperoleh dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkan bukti secara langsung melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi [23].

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan berbagai macam informasi dari sumber mana pun dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara dilakukan peneliti karena memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan kepada Narasumber secara tatap muka [24]. Teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik in-depth interview dengan memanfaatkan voice recorder sebagai media perekam pada saat melakukan wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Arti lain dari observasi adalah seni mengumpulkan data dengan menggunakan indra. Bukan sekedar mengamati dengan mata, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh itulah yang disebut bentuk observasi. Pada penelitian ini menggunakan observasi langsung, penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo dengan mencatat semua informasi yang diperoleh dan diperlukan untuk penulisan penelitian dan dengan meninjau langsung kegiatan yang dilakukan mengenai masalah yang diteliti [25].

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari dan mengambil data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Metode dokumentasi yang digunakan merupakan pelengkap data dari hasil yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan mendokumentasikan dengan mengabadikan setiap kegiatan dalam penelitian. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam gambar, dokumen, tulisan tangan, dan modul software SIKSDA [26].

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data melibatkan penggunaan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan observasi untuk menentukan kebenaran informasi tertentu. Keandalan data kemudian di uji dengan memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Setelah itu akan dimintai untuk menyetujui dua sumber data atau mewawancarai beberapa orang yang mungkin memiliki perspektif berbeda. Setiap metode memberikan bukti atau data yang berbeda dan memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti. Pandangan-pandangan yang berbeda ini menghasilkan pengetahuan yang luas untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya [29].

Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan data secara sistematis yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi. Sehingga peneliti dapat memahami kasus yang diteliti dan menyajikannya untuk wawasan masadepan [27]. Setelah menerima data yang diperoleh melalui penelitian ini, langka selanjutnya adalah mengolahdata yang

terkumpul dengan cara menganalisis, menjelaskan, dan menarik kesimpulan. Karena data yang diperoleh merupakan kumpulan informasi, maka digunakan teknik analisis data kualitatif untuk menganalisis datanya.

Proses analisis data diawali dengan penelaahan terhadap seluruh data yang ada dari berbagai sumber, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis jawaban informan. Apabila analisis menunjukkan jawaban responden kurang memadai, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan kembali dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari kejenuhan data :

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dikumpulkan dan dicatat sebagai bukti bahwa hasil penelitian tersebut asli dan faktual.

b. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini melalui proses pemilihan, peringkasan, dan penyederhanaan hal-hal yang paling penting sesuai dengan pertanyaan penelitian, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang dipilih disederhanakan oleh peneliti dan dikelompokkan sesuai topik permasalahan. Pada saat ini peneliti memilih data primer terkait dengan upaya penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo [28].

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk membantu peneliti memahami keseluruhan atau sebagian penelitian. Kami akan memperkenalkan data sambil menjelaskan hasil wawancara. Hasil disajikan dalam bentuk deskripsi teks naratif dan didukung dengan dokumen, foto, dan bahan visual sejenis untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang disajikan kembali masih bersifat sementara dan dapat berubah jika pengumpulan data tingkat berikutnya tidak menemukan bukti substantif. Namun, apabila kesimpulan yang disampaikan pada tahap pertama didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang disampaikan tersebut menjadi kesimpulan yang dapat diandalkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Implementasi Penerapan Teknologi Informasi SIKSDA pada BPKAD Sidoarjo

Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui gambaran tentang Implementasi Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang ada di BPKAD Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Teknologi Informasi SIKSDA sangat membantu dalam proses pengelolaan yang ada di BPKAD Sidoarjo. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan ketiga Informan yaitu informan pertama TW selaku Sekretaris BPKAD Sidoarjo, kemudian informan kedua NS selaku ASN dengan jabatan sub bidang Evaluasi dan pembinaan Akuntansi, dan informan yang terakhir IA selaku pakar/ tenaga ahli SIKSDA:

“Untuk Teknologi Informasi SIKSDA ini sudah cukup membantu untuk memudahkan, meminimalisir kesalahan, dan kecurangan pada saat pencatatan pengelolaan keuangan. SIKSDA ini juga mampu untuk mempercepat proses pelaporan keuangan” (wawancara dengan informan pertama TW selaku Sekretaris BPKAD Sidoarjo, 12 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).

“Aplikasi SIKSDA ini itu sudah terintegrasi mulai dari perencanaannya, penatausahaan, dan pelaporannya” (wawancara dengan informan kedua NS selaku ASN dengan jabatan sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi, 20 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).

“SIKSDA ini kan bertujuan untuk proses pengelolaan keuangan daerah, jadi dengan kita menggunakan SIKSDA ini akan membuat data kita itu terintegrasi. Jadi data kita menjadi valid dan tidak mungkin ada salah data. Kemudian supaya data laporan kita juga lebih tertib administrasi dan akuntabel juga” (wawancara dengan informan ketiga IA selaku Tenaga Ahli SIKSDA, 23 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut menegaskan bahwa penerapan Teknologi Informasi SIKSDA telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengelola keuangan di BPKAD Sidoarjo. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan, tetapi juga menghasilkan data yang terintegrasi dan valid, serta efektif untuk mengurangi risiko kecurangan. Menurut para informan, SIKSDA telah mempercepat dan menyederhanakan proses pengelolaan keuangan yang sebelumnya seringkali memakan waktu yang cukup lama dalam proses pengelolaan keuangan karena sebelumnya untuk proses pengelolaan keuangan masih menggunakan cara yang terbilang manual. Dengan teknologi informasi ini keuangan dapat diakses dengan cepat dan akurat. Selain itu keberadaan aplikasi ini juga dapat meminimalisir peluang untuk terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BPKAD Sidoarjo didapatkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa penerapan Teknologi Informasi di BPKAD Sidoarjo sudah Efisien. Hasil ini didukung dengan hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu yang pertama TW selaku Sekretaris BPKAD Sidoarjo, informan kedua NS selaku ASN dengan jabatan sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi, kemudian informan yang terakhir IA selaku pakar/tenaga ahli SIKSDA:

“Sejauh ini sudah cukup efisien, misalnya saja pada bidang Perbendaharaan dan Akuntansi yang sudah connct kemana-mana contohnya ke Bank Jatim. SIKSDA itu keutamaannya adalah begitu bendahara masing masing SKPD eksekusi itu transaksi langsung masuk jadi tidak menunggu terlalu lama” **(wawancara dengan informan pertama TW selaku Sekretaris BPKAD Sidoarjo, 12 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).**

“Kalo menurut saya sudah efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian SKPD tidak perlu lagi mencetak dokumen pengajuan pembayaran dikarenakan aplikasi SIKSDA ini sudah paperless, SKPD juga tidak perlu datang ke BPKAD untuk menyerahkan dokumen pembayaran karena SIKSDA sudah terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik” **(wawancara dengan informan kedua NS selaku ASN dengan jabatan sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi, 20 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).**

“Sudah efisien kalo menurut saya ya, karena bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah. Kemudian aplikasinya kan sudah teritegrasi mulai dari penyusunan, penatusahaan, pertanggung jawaban, bahkan sekali input bisa menghasilkan output sekalian. **(wawancara dengan informan ketiga IA selaku Tenaga Ahli SIKSDA, 23 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).**

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi SIKSDA sudah efisien dalam pengelolaan keuangan yang ada di BPKAD Sidoarjo. Selain itu, aplikasi SIKSDA juga telah berhasil terhubung dengan beberapa entitas, termasuk Bank Jatim. Keberadaan aplikasi SIKSDA ini juga memberikan kemudahan bagi setiap SKPD, karena mereka tidak perlu mencetak dokumen pengajuan pembayaran, karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan tanda tangan elektronik. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih baik dalam proses administrasi keuangan. Dengan demikian, SIKSDA telah membawa dampak positif yang nyata dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BPKAD Sidoarjo didapatkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa penerapan Teknologi Informasi di BPKAD Sidoarjo sudah Efektif. Hasil ini didukung dengan hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu informan pertama TW selaku Sekretaris BPKAD Sidoarjo, kemudian informan yang kedua NS selaku ASN dengan jabatan sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi, dan informan yang terakhir IA selaku pakar/tenaga ahli SIKSDA :

“Jika dikatakan SIKSDA ini sudah cukup efektif atau tidak, SIKSDA ini sudah efektif dalam pengelolaan keuangan yang ada di BPKAD. Karena dengan adanya SIKSDA ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan” **(wawancara dengan informan pertama TW selaku Sekretaris BPKAD Sidoarjo, 12 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).**

“Iya benar sudah efektif. Karena SPJ baik pendapatan maupun belanja langsung secara otomatis akan menjadi laporan, baik belanja penatausahaan (LRA) maupun laporan akuntansi seperti neraca, LO, LPE, LAK, LPSAL) jadi tidak perlu membuat neraca secara manual lagi” **(wawancara dengan informan kedua NS selaku ASN dengan jabatan sub bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi, 20 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).**

“Sudah efisien kalo menurut saya ya, karena bisa membuat pekerjaan kita lebih mudah. Kemudian aplikasinya kan sudah teritegrasi mulai dari penyusunan, penatusahaan, pertanggung jawaban, bahkan sekali input bisa menghasilkan output sekalian. Kemudian SIKSDA ini juga sudah efisien, efektif, dan akuntanbel menurut saya. **(wawancara dengan informan ketiga IA selaku Tenaga Ahli SIKSDA, 23 Februari 2024, di BPKAD Sidoarjo).**

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan tersebut menegaskan bahwa penerapan aplikasi SIKSDA di BPKAD Sidoarjo sudah sangat efektif. Aplikasi ini sangat terampil dalam menyederhanakan pengelolaan keuangan, termasuk penyusunan neraca dan laporan keuangan tanpa harus melibatkan proses manual. Keunggulan aplikasi ini terpancar dari integrasinya yang menyeluruh, mulai dari penyusunan data hingga pertanggungjawaban, yang lebih baik lagi SIKSDA ini juga bisa menginput satu kali dan menghasilkan output sekalian. Dalam era digital, penggunaan aplikasi SIKSDA penting bagi lembaga keuangan publik agar tetap relevan dan efisien.

B. PEMBAHASAN

a) Implementasi Penerapan Teknologi Informasi SIKSDA pada BPKAD Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan Teknologi Informasi SIKSDA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Melalui implementasi SIKSDA, proses pengelolaan keuangan menjadi jauh lebih mudah untuk dilakukan. Salah satu manfaat utama yang dihasilkan dari penggunaan SIKSDA ini adalah kemampuannya untuk mempercepat proses pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dapat diminimalkan secara signifikan. Tidak hanya untuk mempercepat pelaporan, SIKSDA juga berperan penting dalam meminimalisir potensi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Integrasi data keuangan menjadi satu kesatuan yang valid. Hal ini berdampak positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat terkait kondisi keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) memberikan kontribusi positif yang besar terhadap efisiensi, efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di BPKAD Sidoarjo. SIKSDA tidak hanya mempermudah dalam proses pengelolaan keuangan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan pengawasan atas penggunaan anggaran daerah. Sebagai hasilnya, kinerja keuangan BPKAD Sidoarjo menjadi lebih terstruktur dan terkontrol.

Pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIKSDA memberikan manfaat yang signifikan bagi efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Namun, seiring dengan manfaatnya, juga timbul beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala yang muncul adalah ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. SIKSDA adalah aplikasi berbasis web, yang berarti untuk mengaksesnya dibutuhkan akses internet yang baik. Ketika terjadi gangguan pada koneksi internet, seperti gangguan teknis atau koneksi yang lambat, hal ini dapat menghambat pada proses pengelolaan keuangan serta pencairan dana yang diperlukan.

Pada BPKAD Sidoarjo saat ini telah diterapkan penggunaan bandwidth sebesar 10GB untuk mendukung operasional SIKSDA. Namun demikian, penggunaan bandwidth tersebut masih dirasakan kurang optimal terutama mengingat kebutuhan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan pertumbuhan dan kompleksitas kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang, kapasitas bandwidth yang tersedia mungkin tidak lagi memadai untuk memenuhi semua kebutuhan operasional SIKSDA. Oleh karena itu, perlunya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan bandwidth yang diperlukan untuk mendukung SIKSDA agar tetap beroperasi secara optimal.

Dalam pengaplikasian SIKSDA juga memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan. Salah satu kekurangan utamanya adalah ketergantungan kepada penyedia layanan, yang dapat meningkatkan biaya secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan perlunya alokasi anggaran khusus untuk layanan tersebut. Selain itu, penggunaan SIKSDA juga memerlukan kapasitas server yang besar untuk menyimpan semua data secara digital, karena prosesnya dilakukan tanpa mencetak dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengantisipasi kebutuhan infrastruktur teknologi yang mungkin menjadi tambahan biaya dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, ada juga kelebihan dalam menggunakan aplikasi SIKSDA. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghindari kesalahan entri dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dengan integrasi transaksi pembayaran langsung ke dalam SPJ, proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih lancar dan risiko kesalahan entri dapat diminimalisir. SPJ merupakan dokumen yang digunakan bendaharapengeluaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam mentaushakikan pertanggungjawaban laporan, oleh karena itu keakuratan dan kejelasan dalam pencatatan sangat penting. Dengan adanya aplikasi SIKSDA ini setiap pengeluaran atau pengguna dana dapat didokumentasikan dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara akurat, mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

b). Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penerapan Teknologi Informasi SIKSDA pada BPKAD Sidoarjo sudah efisien dalam pengelolaan keuangan, hal tersebut dapat diukur dari:

1. Kemajuan yang cukup signifikan dalam efisiensi sistem, terutama dalam bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. Koneksi yang telah dibangun telah memperlihatkan hasil yang memuaskan, misalnya sudah connect kemana-mana terutama di Bank Jatim. Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) sudah memperlihatkan keunggulannya dengan memungkinkan bendahara dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan transaksi secara langsung. Hal ini dapat mengurangi waktu yang terlalu lama sebelum transaksi dieksekusi, sehingga proses keuangan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
2. Penggunaan aplikasi SIKSDA yang telah terbukti efisien dalam berbagai aspek, seperti waktu, tenaga, dan biaya. Dengan menggunakan aplikasi SIKSDA, proses pengajuan pembayaran menjadi lebih cepat dan efektif. Selain itu, keunggulan utama dari SIKSDA adalah aplikasi SIKSDA ini sudah paperless yang artinya pengelolaan administrasinya sudah tidak menggunakan kertas dan beralih ke dokumen digital. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi biaya terkait dengan pengadaan kertas dan

- pencetakan dokumen.
3. Integrasi SIKSDA yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Hal tersebut juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, jadi SKPD tidak perlu datang lagi ke BPKAD untuk menyerakan dokumen pembayaran secara fisik. Dengan adanya integrasi ini, proses persetujuan dan verifikasi dapat dilakukan secara elektronik, menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk pertemuan secara langsung.
 4. Dengan menggunakan aplikasi SIKSDA, banyak proses yang dulunya memakan waktu dan tenaga dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah. Keberadaan fitur-fitur terintegrasi dalam aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tahap pekerjaan, mulai dari penyusunan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dengan lebih lancar dan efisien. Satu hal yang patut diperhatikan adalah kemudahan dalam proses input atau output yang diberikan oleh aplikasi ini. Dengan sekali input, kita dapat langsung mendapatkan output yang diinginkan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses manual.
 5. Penggunaan aplikasi SIKSDA yang membawa manfaat besar bagi efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga membantu dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
- c). **Penerapan Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, penerapan Teknologi Informasi SIKSDA pada BPKAD Sidoarjo sudah dikatakan efektif dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SIKSDA, maka akan ditemukan perbedaan yang signifikan:

1. Sebelum memanfaatkan aplikasi SIKSDA, sering terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan karena masih mengandalkan sistem pencatatan manual. Namun, setelah menggunakan aplikasi SIKSDA, sudah tidak ada lagi kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan yang ditemukan. Karena jika terjadi kesalahan pada saat mencatat, program akan secara otomatis memperbaiki sesuai keinginan dalam pengelolaan keuangan tanpa harus berusaha ekstra untuk menyusunnya kembali.
2. Sebelum menggunakan aplikasi SIKSDA, untuk proses pengelolaan keuangan harus memerlukan waktu yang cenderung cukup lama. Karena laporan harus disusun dengan teliti demi menghindari kesalahan dalam laporan keuangan. Namun setelah adanya aplikasi SIKSDA, proses pengelolaan keuangan menjadi efisien karena sistem sudah berbasis online yang memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu, proses yang sangat mudah, cepat, dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Teknologi Informasi SIKSDA sudah signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di BPKAD Sidoarjo. Dengan adanya SIKSDA dapat mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan keuangan serta mengurangi risiko kecurangan.

Kemudian untuk penerapan Teknologi Informasi SIKSDA ini sudah terbukti Efisien dalam Pengelolaan Keuangan. Hal tersebut dapat diukur dari SIKSDA yang sudah terhubung dengan beberapa entitas terutama Bank Jatim, aplikasi SIKSDA yang sudah paperless, integrasi SIKSDA sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan ketika menggunakan aplikasi SIKSDA waktu yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah tidak memakan waktu dan tenaga.

Selanjutnya untuk penerapan Teknologi Informasi SIKSDA juga sudah terbukti efektif dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari sebelum menggunakan SIKSDA sering terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan karena masih menggunakan sistem pencatatan manual, namun setelah menggunakan aplikasi berbentuk web ini proses pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah dan ketika terjadi kesalahan, sistem akan secara otomatis memperbaiki.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak BPKAD Sidoarjo dan teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, serta kepada kedua orang tua dan kakak saya yang telah mendukung sepenuhnya. Tanpa kerjasama dan dukungan mereka, artikel ini tidak akan terwujud dengan baik. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.

REFERENSI

- [1] Tumija, A. Hendra, and Dkk, "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .). Manusia telah mengembangkan peningkatan

- teknologi ya,” *J. Media Birokrasi*, vol. 5, no. 1, pp. 79–91, 2023.
- [2] T. S. Ramli *et al.*, “Pemanfaatan Teknologi Bagi Siswa Dalam Menyokong Peningkatan Ekonomi Digital dan Upaya Menghadapi Era Society 5 .0,” *J. Ilmu Huk. Kenotariatan*, vol. 6, pp. 81–98, 2022.
- [3] U. S. Anggraeni, R. Iskandar, and Rusliansyah, “Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Murindo Multi Sarana di Samarinda,” *J. Ilmu Akunt.*, vol. 17, no. 1, pp. 163–171, 2020.
- [4] A. Khaerunnisa, “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Pada Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero),” *Eprints.Unm.Ac.Id*, no. 1292142029, pp. 1–9, 2018, [Online]. Available: <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/14642>
- [5] S. I. Kusuma, S. B. Pambudi, and A. W. Suprayitno, “Standar Biaya Dan Kinerja: Pengaruh SbkK Terhadap Efisiensi Anggaran K/L,” *J. Anggar. dan Keuang. Negara Indones.*, vol. 1, no. 1, p. 20, 2019, doi: 10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art45.
- [6] 2018 Rahmah Muthia, “ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO (Studi Kasus SKPD di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo),” pp. 1–26, 2018.
- [7] Fajarudin, “Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Semin. Nas. Teknol. Edukasi Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 662–671, 2021.
- [8] T. Theodoridis and J. Kraemer, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,” pp. 98–109.
- [9] Y. K, “Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah,” *J. Katalogis*, vol. 5, no. 4, pp. 160–171, 2019.
- [10] G. Asmadeningrum Rosady *et al.*, “Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT,” *J. Relasi Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 166–181, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.357>
- [11] M. I. Nasution and N. M.Si, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, p. 109, 2021, doi: 10.29103/jak.v9i2.4577.
- [12] febriana F. Albugis, “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *J. EMBA*, vol. 4, no. 3, pp. 78–89, 2016.
- [13] P. Prestasi, B. Mahasiswa, and M. Penerapan, “Jurnal Ilmiah Manajemen,” *Kusuma Dewi Arum Sari Agus Frianto*, vol. 18, no. 1, pp. 89–100, 2013.
- [14] I. I. Haza, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang),” *Fak. Ekon. Univ. Negeri padang*, vol. 3, no. 1, pp. 1–19, 2015.
- [15] J. Rohmah and H. Sukmana, “Implementasi Sistem Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Pada Desa Permisian dalam,” vol. 6, no. 2, 2023.
- [16] M. Ryas, “Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dengan Model Cipp Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh,” *Eval. Pemanfaat. Sist. Inf. Pemerintah. Drh. Dengan Model Cipp Dalam Mewujudkan Good Gov. Di Kabupaten Aceh Teng. Provinsi Aceh*.
- [17] P. M. Guarango, “IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI DESA MOJOMALANG (Studi Kasus : Layanan Mandiri),” *γ787*, vol. 3, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [18] M. A. Ridwan, “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 3, p. 198, 2019.
- [19] R. Selung, I. Wasliah, and E. A. Pratiwi, “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,” pp. 1–23, 2014.
- [20] S. Herman *et al.*, “ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH: SUATU STUDI KUALITATIF,” *Jur. Tek. Kim. USU*, vol. 3, no. 1, pp. 18–23, 2019.
- [21] S. C. U. Mardia Rahmi dalam Oboi, “ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIKDA) BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo) Abstrak,” 2013.
- [22] D. Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan,” *LONTAR J. Ilmu Komun.*, vol. 6, no. 1, pp. 13–21, 2018, doi: 10.30656/lontar.v6i1.645.
- [23] M. S. Sari and M. Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan

- Kecamatan Langkapura,” *J. Ekon.*, vol. 21, no. 3, p. 311, 2019.
- [24] Z. Yusra, R. Zulkarnain, and S. Sofino, “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19,” *J. Lifelong Learn.*, vol. 4, no. 1, pp. 15–22, 2021, doi: 10.33369/joll.4.1.15-22.
- [25] R. W. Husnul Khaatimah, “Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar,” *J. Teknolofi Pendidik.*, vol. 2, no. 2, pp. 76–87, 2017.
- [26] Y. Apriyanti, E. Lorita, and Y. Yusuarsono, “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Prof. J. Komun. dan Adm. Publik*, vol. 6, no. 1, 2019, doi: 10.37676/professional.v6i1.839.
- [27] Ahmad and Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif,” *Proceedings*, vol. 1, no. 1, pp. 173–186, 2021.
- [28] N. & K. Hidayati, “Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh),” *J. Ilm. Mhs. FISIP Unsyiah*, vol. 2, no. November, pp. 181–191, 2017, [Online]. Available: <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/2700>
- [29] F. A. Khoirunnisa *et al.*, “Implementation of Financial Accounting Standards for Micro , Small and Medium Entities in the Preparation of Financial Statements to Increase Transparency and Accountability (Study on Deedoki ’ s Business in Bligo Village , Candi District) [Implementas,” pp.1–

